

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kaitannya Dengan Peran PPID Kota Bandung, Dalam Penyediaan Informasi Publik di Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi di PPID Kota Bandung ini dijalankan dengan baik, mampu menciptakan layanan Keterbukaan informasi publik baik berbasis website, Apps, atau Desk Layanan langsung, yang lebih memudahkan masyarakat sebagai penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor pengukur keberhasilan penerapan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, pada implementasinya terdapat 2 (dua) bentuk komunikasi yang digunakan oleh PPID Kota Bandung, yaitu komunikasi secara internal dan komunikasi secara eksternal, yang dapat diturunkan sampai kepada bentuk vertikal maupun horizontal. Proses komunikasi secara internal vertikal dilakukan oleh PPID Kota Bandung dengan cara berkomunikasi antara Bidang Diseminasi Informasi dengan kepala Diskominfo sebagai PPID Utama dengan melalui rapat kordinasi dan Chat Whatsapp dalam mengkomunikasikan program/kebijakan yang akan di laksanakan.

Sedangkan secara horizontal dilakukan dengan cara komunikasi di internal bidang diseminasi informasi, yang di dalam-nya terdapat Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik, Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi, dan Seksi Kemitraan Informasi Masyarakat, dengan bidang lain yang sejajar seperti Bidang Data dan statistik di Diskominfo.

Selain terdapat komunikasi internal, ada juga komunikasi eksternal, dimana suatu proses berkomunikasi dengan pihak luar PPID Kota Bandung, komunikasi secara Horizontal dilakukan oleh PPID dengan PEDASI yang ada di setiap SKPD di setiap Badan, Dinas, Kecamatan, BLUD, BUMD di Kota Bandung dengan melalui surat dan berkordinasi langsung serta berkomunikasi tatap muka.

Sedangkan komunikasi secara vertikal, PPID berkomunikasi dengan Komisi Informasi Jawa Barat dengan melalui surat menyurat dan dokumen sengketa informasi publik. karena Komisi Informasi menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan tatap muka, dengan melaporkan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Selain itu PPID berkomunikasi dengan masyarakat Kota Bandung dalam mempublikasikan pentingnya keterbukaan informasi publik dengan menggunakan media seperti sosialisasi secara langsung ke setiap kecamatan di Kota Bandung. Komunikasi eksternal secara vertikal dilakukan PPID melalui komunitas seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dengan mengkoordinasikan upaya edukasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dari berbagai bentuk komunikasi internal dan eksternal baik secara vertikal maupun horizontal, sudah dilakukan dan dijalankan dengan baik oleh PPID Kota Bandung, karena dari pemilihan channel yang dipakai oleh PPID itu cenderung mudah dilaksanakan, dan mempercepat proses komunikasi kepada stakeholder lain yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik, yang akan menimbulkan feedback atau tanggapan dari masyarakat itu sendiri dan senantiasa terdapat komunikasi resiprokal dalam kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini.

Komunikasi resiprokal atau umpan balik dari masyarakat sebagai bukti bahwa komunikasi kebijakan kepada pihak eksternal berhasil, dimana kebijakan keterbukaan informasi publik disampaikan dengan baik kepada masyarakat sebagai stakeholder yang merasakan pelayanan dari PPID, sampai kepada tahap dimana masyarakat bisa mengkritisi informasi yang berkenaan dengan kebijakan pemerintahan Kota Bandung. Melalui media yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai saluran dalam mengakses informasi publik, dan menyampaikan aspirasinya, dapat melalui aplikasi, website, penyuluhan PPID, maupun datang langsung ke kantor yang dapat dijadikan masukan untuk PPID agar dapat memperbaiki pelayanan yang belum optimal, dan mempertahankan pelayanan yang sudah baik. Masyarakat Kota Bandung senantiasa dapat mempergunakan saluran yang disediakan PPID untuk dapat melihat informasi publik. Peran dari PPID sebagai transfer informasi kepada masyarakat Kota Bandung, perlu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, karena partisipasi juga ditentukan oleh komitmen pemerintah, sehingga masyarakat dalam mengontrol pembangunan dapat menjadi sangat baik dan efektif. Bukan saja dilakukan oleh kalangan tertentu,

seperti kalangan pengusaha, peneliti, LSM, wartawan, atau hanya untuk kalangan menengah ke atas melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula informasi yang datang melalui PPID harus di backup dari masing-masing SKPD yang menjadi jembatan antara pemerintah Kota Bandung dengan masyarakatnya.

## 2. Sumberdaya

Sumber daya pendukung yang ada di PPID meliputi Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, sumber daya yang harus pertama diperhatikan ialah SDM, yang mana SDM ini sebagai pelaksana bagaimana keterbukaan informasi ini dapat berlangsung seperti Arsiparis untuk pendokumentasian, yang kedua yaitu tenaga Kehumasan untuk stay di Desk Layanan, terakhir tenaga IT yang bertugas untuk mengelola website, dan 4 orang PPID untuk mengurus seluruh informasi yang ada., yang kemudian sumber daya selanjutnya adalah kebijakan pimpinan, dan mengetahui arah kebijakan pimpinan itu bagaimana, untuk saat ini arah kebijakan pemerintah mendukung Diskominfo, karena pimpinan daerah itu menginginkan adanya smart city.

Sumber daya finansial di PPID pada tahun 2017 yaitu 2,3 Milyar, dan untuk tahun 2018 1,9 Milyar, yang digunakan untuk kegiatan operasional seperti workshop, pengembangan website, advertorial di koran, sosialisasi, gaji tenaga ahli, dan inventaris kantor.

Kemudian terdapat kendala dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dari segi sumber daya, yaitu Sumber Daya Manusia yang tidak merata, karena semua PPID Pembantu juga harus memiliki Arsiparis, Kehumasan, dan tenaga IT, dan di PPID Pembantu belum dijadikan TUSI (Tugas Utama dan

Fungsi) yang diartikan bahwa masih menjadi tugas tambahan yang otomatis tidak dirasa terlalu penting, Sudah tersedianya anggaran yang dirasa cukup dalam mengimplementasikan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, kemudian sarana dan prasarana yang ada di PPID sudah memadai dalam standar pelayanan informasi publik, yaitu ada Desk Layanan langsung dan Desk Layanan Media, dapat berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.

Kemudian kapasitas dan kualitas aparatur (SDM) juga sudah memadai di dalam PPID Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian yang menjadi kendala bagi PPID Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan keterbukaan informasi adalah kekurangan dalam jumlah SDM, karena rekrutment PNS nya itu sudah di porsir harus berapa di setiap bagian organisasi di pemerintah Kota Bandung, sehingga tidak bisa sembarang dalam menentukan jumlah SDM dari PPID itu sendiri.

Dapat dianalisis bahwa dalam hal sumber daya anggaran, PPID mempunyai kuantitas anggaran yang cukup memadai dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik, sedangkan untuk Sumber daya manusia dapat dikatakan kurang dalam hal kuantitas, karena terbilang sedikit untuk SDM nya akan tetapi memadai dalam hal kualitas, karena profesionalitas keseluruhan untuk PPID sangat baik.

### 3. Disposisi

Dalam pembagian tugas nya PPID dibagi menjadi dua, yaitu PPID utama yang dijabat oleh Kepala DISKOMINFO dan PPID pembantu dijabat oleh para SKPD yang ada di masing-masing Dinas, Badan, Inspektorat, dan Bagian yang ada

di Bandung, yang mana PPID mengkoordinasikan penyelenggaraan tanggungjawab pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap SKPD dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik, setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja yang sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Yang kemudian apabila ingin mempercepat proses pemberian informasinya, PPID Kota Bandung mempunyai portal website yang dapat digunakan untuk mempercepat pelayanannya.

Dalam hal pertanggungjawaban, PPID harus membuat laporan per semester dan tahunan, dengan melaporkan jumlah permohonan yang masuk, jumlah sengketa informasi dan trend permintaan informasi publik pada saat itu. Selain itu hasil rapat dari PPID harus dibuat laporan dan yang nantinya akan ditujukan ke atasan, dapat berbentuk Nota Dinas, kemudian di tanda tangan oleh atasan, kemudian dilaporkan kepada kepala dinas, dan ada juga MONEV (Monitoring dan Evaluasi), dimana monev itu menilai sudah sebaik apa PPID itu memberikan informasi publik maka dari itu bagaimana tujuan akhir dari Keterbukaan Informasi publik ini adalah dapat terciptanya smart city.

Secara pelayanan, PPID bertanggungjawab kepada Ombudsman yang menilai tentang pelayanan informasi, yang kemudian dari Monev tersebut Ombudsman akan menilai dari laporan yang disediakan oleh PPID apakah seluruh pelayanan yang ada dapat dijalankan dengan baik dan benar, dan sesuai ruang lingkup kewenangan di masing-masing bidang yang ada di dalamnya. Pertanggungjawaban secara Keterbukaan Informasi Publik PPID bertanggungjawab kepada Komisi Informasi Jawa Barat dengan memberikan

laporan tentang total informasi yang masuk, informasi yang seperti apa, secara internal bertanggungjawab ke Atasan PPID, karena setiap sengketa informasi publik ditujukan nya kepada Atasan PPID.

Kemudian seluruh masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi publik yang disediakan oleh PPID Kota Bandung, sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) yaitu : 2) Setiap Orang berhak: melihat dan mengetahui Informasi Publik; dan dampak kedepannya yaitu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Kota Bandung. Kemudian pada dasarnya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus bisa mengakses informasi publik, sehingga setelah informasi itu didapatkan oleh masyarakat, sehingga akan dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, dapat berupa partisipasi, meningkatkan perannya dalam memberikan saran yang membangun bagi pemerintah Kota Bandung, dan atau apatis, dalam kasus ini pemerintah harus turun tangan dengan adanya sosialisasi mengenai pentingnya informasi yang terbuka, agar masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan publik untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang akan datang.

#### 4. Struktur Birokrasi

PPID Utama diduduki jabatannya oleh Kepala Diskominfo, hal ini tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014, bahwa : PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya ada PPID Pembantu yang dijabat oleh para sekretaris yang ada di setiap SKPD, BUMD, BLUD, dan bagian di Kota Bandung. kordinasi dari atas itu mandat dari Walikota dan wakil walikota sebagai

pimpinan badan publik, yang kemudian berlanjut ke bagian organisasi yang dibawahnya yaitu ada atasan PPID yang jabatannya diduduki oleh Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah sendiri mempunyai wewenang sebagai stakeholder Penyusun kebijakan pemerintah daerah, yang kemudian mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, kemudian proses kordinasi secara horizontal di PPID ini sejajar dengan Tim Pertimbangan Informasi yang jabatannya diduduki oleh Eselon II atau setingkat Kepala Dinas.

Kemudian ada keselarasan pendapat antar PPID mengenai bagaimana kordinasi dapat berjalan di dalam PPID tersebut dalam mengemban tugas untuk mempublikasikan informasi, dimana ada keselarasan yang harmonis mengenai kordinasi di masing-masing bagian, satu sama lain dapat terhubung agar bagaimana mengupayakan pelayanan ini dapat berlangsung secara terintegrasi dan dapat diprediksi, dalam kasus ini yaitu peran PPID Pembantu dapat mengcover informasi publik yang memang masyarakat sering butuhkan, yaitu mengenai pendidikan, karena sekolah itu merupakan badan publik, maka harus ada PPID, dalam hal ini peran PPID Pembantu dapat terlihat dalam mengupayakan informasi yang terbuka dalam bidang pendidikan.

Adanya kordinasi yang baik diantara PPID ini sudah tercermin melalui pendapat masyarakat peminta informasi yang sudah pernah datang ke kantor, dimana menurut informan, pelayanan informasi yang diberikan cepat tanggap, dan pada saat melakukan permohonan informasi, pemohon tersebut menggunakan Apps, agar dapat mempermudah proses permintaan informasi publik nya.



pelayanan informasi publik dipermudah dengan adanya inovasi penggunaan teknologi dalam pemerintahan, namun cara konvensional tetap dipakai oleh PPID Kota Bandung, karena tidak semua orang bisa menyempatkan untuk membuka website, dan tidak semua umur dapat menggunakan teknologi, contohnya yaitu mungkin untuk seorang mahasiswa dan pekerja itu mudah menggunakan teknologi. Pelayanan optimal bisa didapatkan oleh Diskominfo, apabila melaksanakan pelayannya dengan baik, dan masyarakat senantiasa puas pada pelayannya, yang bisa dibuktikan dengan adanya survei kepuasan masyarakat.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Umum**

Dengan memperhatikan bahwa indikator keberhasilan Implementasi Kebijakan dari George Edward III yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi sudah dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa sub indikator yang masih memiliki kendala-kendala, maka saran yang diberikan peneliti untuk PPID Kota Bandung berdasarkan kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah:

- a. Dapat meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik melalui website, dengan lebih mengupload lebih banyak informasi kedalam website.
- b. Lebih berkomunikasi lebih lanjut dengan para SKPD, agar permintaan informasi nya bisa lebih mudah.
- c. Merekrut lebih banyak non-PNS, dan proses selektif dalam melakukan rekrutmen tersebut diperketat, agar tidak kekurangan SDM itu sendiri

## **6.2.2 Saran Khusus**

### **1. Komunikasi**

- Dalam proses komunikasinya, PPID harus lebih meningkatkan komunikasi antar SKPD, agar dapat mempercepat proses pelayanan permintaan informasi publik
- Mencoba sosialisasi dengan cara media cetak, dan lebih mengoptimalkan sosialisasi secara langsung, karena untuk sosialisasi secara langsung dengan masyarakat itu sudah sering dilakukan
- Mengoptimalkan komunitas yang bergerak di bidang informasi seperti KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) agar tidak hanya pemerintah yang turut serta dalam publikasian informasi publiknya.

### **2. Sumber Daya**

- Dapat meningkatkan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan komunitas informasi masyarakat, agar dapat memperkaya jalinan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat
- Lebih meningkatkan kapasitas server website PPID Kota Bandung, agar informasi publik yang akan di publikasikan melalui website dapat lebih banyak
- Lebih memperbanyak SDM di internal PPID Kota Bandung agar dapat mendistribusikan tugasnya, agar tidak adanya tugas ganda dari

PPID, sehingga pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan cepat

- Membuat rancangan anggaran honorarium yang tetap untuk PPID Pembantu dalam menyampaikan informasi melalui media sosial.

### **3. Disposisi**

- Dapat lebih meningkatkan fokus kewenangan di masing-masing bidang, agar tugas dan peran tidak tumpang tindih satu sama lain.
- Hasil MONEV (Monitoring dan Evaluasi) agar bisa dijadikan acuan untuk PPID dalam melihat keseriusan Badan Publik dalam menciptakan transparansi dan keterbukaan di Kota Bandung.

### **4. Stuktur Birokrasi**

- Mengkordinasikan bidang-bidang lain yang bersangkutan seperti Bidang Data dan Statistik untuk lebih sering melakukan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi.
- Lebih memfokuskan kepada saran dari masyarakat, sebagai tindak lanjut dan perbaikan dari pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung khususnya pada PPID.
- Meningkatkan inovasi pelayanan keterbukaan informasi publik, dengan cara pemangkasan birokrasi, agar komunikasi antar SKPD menjadi cepat dan lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta, 2008
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Brennan, D Lawrence . *Modern Communication Effectiveness*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 1963.
- Bungin, Burhan, H.M. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Kencana Prenama Media Group, 2007
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*. Los Angeles: Sage Publications Inc. 2009
- Curtis Dan B., Floyd James J. Winsor, L, Jerry. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*, terjemahan Nanan Kandagasari, Rina Komara dan Yeti Pudjjiyati. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2002
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999

- Edward, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980
- Howlett, Michael, M Ramesh. *Studying Public Policy : Policy Cycles And Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press, 1995
- Keban T Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media, 2008
- Kriyantono, R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006
- Lindblom, Charles. *Proses Penetapan Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Penerjemah Ardian Syamsudin. Jakarta : Airlangga, 1986
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media, 2003
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007
- Ripley, B Randall. Grace A. Franklin. *Bureacracy and Policy Implementation*. Homewood, illiois : The Dorsey Press, 1982
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2008
- S. Amir. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia, 1993
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003
- Stainback, Susan and William Stainback. *Understanding And Conducting Qualitative Research*. Iowa : Kendal Publishing Company, 1988.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2008.

Suryani, Tanti Budi, Ahmad Faisol. “*Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT. Dalam Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30*”. (Jakarta: LP3ES. 2010) hlm 76

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta. 2005

Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Trenholm, Sarah. Jensen., Arthur *Interpersonal Communication*. England: Paperback. 2011.

Wahab, Abdul Sochlihin. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008

Waldo, Dwight. *Public Administration-Study and Teaching*. Garden City, N.Y : Doubleday. 1955.

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media. 2011

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta : CAPS, 2016.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Keputusan Walikota Bandung Nomor : 480/Kep.179.Diskominfo/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

#### **DOKUMEN**

Laporan hasil Monev (Monitoring dan Evaluasi) Penerapan UU KIP di Kota Bandung Tahun 2017

#### **JURNAL**

Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi) Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No. 2, Desember 2013 hlm 196-205 dari [jurnal.unpad.ac.id/jkk/article](http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article), pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 17.00

Estrada Rizki O.P. *Tanggapan Atas Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari [komisiinformasi.jabarprov.go.id](http://komisiinformasi.jabarprov.go.id) pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 11.11

- Hertina, Lisa Meisayu. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kantor Kepolisian Resort Klaten*. 2015. Diakses Dari Portalgaruda.Org Pada Tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 20.00
- Mulya, Margi Yeniarta. *Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Governance*. Diakses dari <http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/blog/terwujudnya-keterbukaan-informasi-publik-menuju-good-governance> pada tanggal 07 Agustus 2018, Pukul 18.00
- Prabowo Dwi Rizki. *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ) Universitas Diponegoro*. diakses dari medianeliti.com pada tanggal 08 Agustus 2018 pukul 1.12
- Sirajuddin. Bima Sakti Wiyono Putro Peran Ppid Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Hukum Pelayanan Publik : Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press, Malang, 2011, Hal. 108.
- Suryani, Tanti Budi, Ahmad Faisol. *Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam *Majalah Prisma Edisi: Masyarakat Terbuka Indonesia Vol: 30*". Jakarta: LP3ES, 2010.



Wiyono Putro Bima Sakti. *Jurnal Skripsi Peran Ppid Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik*. 2016. diakses dari medianeliti.com pada tanggal 07 Agustus 2018 Pukul 17.00

**WEBSITE :**

Dinas Komunikasi dan Informatika. *Informasi mengenai Diskominfo Kota Bandung*. Melalui [www.diskominfo.bandung.go.id](http://www.diskominfo.bandung.go.id) diakses pada tanggal 09 Oktober 2017 Pukul 09.00 WIB

Komisi Informasi Jawa Barat. *Hasil Pemeringkatan 2017*. Melalui [komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id) diakses pada tanggal 09 Agustus 2018 Pukul 00.12 WIB

Komisi Informasi Pusat. *Laporan Pelayanan Informasi Publik*. Melalui [komisiinformasi.jabarprov.go.id](http://komisiinformasi.jabarprov.go.id) diakses pada tanggal 09 Agustus 2018 Pukul 01.00 WIB

Open Data Kota Bandung. *Data Set Diskominfo Kota Bandung*, melalui [www.data.bandung.go.id](http://www.data.bandung.go.id) diakses pada tanggal 08 Januari 2018 Pukul 21.00 WIB

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. *Daftar Informasi Publik PPID Kota Bandung*, melalui [www.Ppid.bandung.go.id](http://www.Ppid.bandung.go.id) diakses pada tanggal 07 Oktober 2017 Pukul 07.00 WIB

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Diponegoro, *Penjelasan dan Layanan Informasi Publik*, melalui <http://ppid.undip.ac.id> diakses pada tanggal 07 Juli 2018 Pukul 07.00 WIB

Pemerintah Kota Bandung. Selayang Pandang dan Transparansi Keuangan Kota Bandung, Melalui <https://portal.bandung.go.id/> pada tanggal 09 September 2017 WIB